

Soft Power sebagai Instrumen Perang Moral: Pendekatan Etika Strategis dalam Pertahanan Kultural

Soft Power as an Instrument of Moral Warfare: A Strategic Ethical Approach to Cultural Defense

Muhammad Ridwan Al Fauzi

Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: aridstrike998@gmail.com

Abstract

The characteristics of global conflict have changed, specifically with a strengthening of moral power and cultural influence. These two elements play an important role in modern defense strategies. Understanding the context of both hybrid and informational warfare will undoubtedly begin with an assessment of how a nation maintains its moral legitimacy in relation to its military capabilities. This research attempts to explain the role of soft power as an instrument of moral warfare to strengthen cultural defense strategies. Using an integrative qualitative research approach, this study attempts to synthesize several pieces of literature on war ethics, soft power, and cultural propaganda published between 2015 and 2025. The analysis was conducted in four steps: identification, selection, categorization, and synthesis of literature. Using the principle of triangulation across the disciplines of moral philosophy, strategic communication, and defense studies. The results of this study provide an overview that moral warfare is formed from three fundamental components: the ethical basis of war and its moral legitimacy, the transformation of values through soft power, and the response to moral crises in the information warfare environment, which emphasizes morality as the core of national strength. This study confirms that maintaining morality is just as urgent as maintaining physical authority. Especially in this era of widespread misinformation, moral strength is a sustainable form of defense.

Keywords: *cultural defense, information warfare, moral warfare, soft power, strategic ethics*

Abstrak

Karakteristik dari konflik global sudah mengalami perubahan yang secara spesifik terjadi penguatan pada kekuatan moral dan pengaruh budaya. Kini kedua elemen

tersebut berperan penting dalam strategi pertahanan era modern. Memahami konteks *hybrid* maupun *informational warfare* tentunya akan berangkat dari penilaian bagaimana negara mempertahankan legitimasi moral yang dimiliki akan senilai dengan kemampuan militer yang dimiliki. Penelitian ini berusaha menjelaskan peran *soft power* berfungsi sebagai instrument perang moral untuk menguatkan strategi pertahanan kultural. Melalui pendekatan penelitian kualitatif integratif berusaha memberikan sintesis dari beberapa literatur mengenai etika perang, *soft power* dan propaganda budaya yang diterbitkan antara tahun 2015-2025. Analisis yang dilakukan melalui empat tahap yaitu identifikasi, seleksi, kategorisasi dan sintesis literatur. Menggunakan prinsip triangulasi disiplin ilmu filsafat moral, komunikasi strategis dan studi ilmu pertahanan. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa perang moral terbentuk dari tiga pilar yaitu dasar etika perang beserta legitimasi moralnya, transformasi nilai melalui *soft power* dan respons pada krisis moral dalam arena perang informasi yang menitikberatkan moralitas sebagai inti kekuatan nasional. Studi ini menegaskan bahwa mempertahankan moralitas sama urgensinya dengan mempertahankan kedaulatan fisik. Terutama dalam perkembangan zaman yang ramai oleh disinformasi ini menjadikan kekuatan moral adalah bentuk pertahanan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: etika strategis, perang informasi, perang moral, pertahanan kultural, *soft power*

Pendahuluan

Dinamika konflik global saat ini memosisikan kekuatan militer tidak hanya dilihat dari kekuatan sistem persenjataan yang dimiliki. Tuntutan untuk memiliki pengaruh, legitimasi moral dan citra budaya memainkan peran penting dalam menunjukkan posisi kekuatan militer. Pergeseran pandangan ini menunjukkan bahwa karakteristik peperangan sudah semakin mendekat dengan bentuk perang hibrida maupun perang informasi. Apa yang ditunjukkan dengan pergeseran ini berfokus pada ide dan nilai adalah arena baru peperangan modern. Dalam elaborasi ini berpegang pada konsepsi *soft power* yang diusung oleh Joseph Nye (2019; 2006) bahwa domain budaya, nilai dan moralitas suatu negara menjadi sumber kekuatan strategis yang memiliki efektivitas serupa dengan kekuatan militer konvensional. Dibalik keyakinan besar itu muncul permasalahan etis mengenai sejauh apa kekuatan tersebut mampu dipergunakan tanpa keluar dari prinsip moralitas sebagai dasar

legitimasi negara.

Diskusi moralitas dalam ranah strategi kekuasaan sebuah negara bukan isu baru dalam studi ilmu pertahanan. Tradisi filsafat politik dan pertahanan sudah mengelaborasi hubungan keduanya melalui konsepsi kekuasaan dan etika. Salah satu elaborasi tersebut menghasilkan konsepsi *Just War Theory* (Baleng, 2025; Iverson, 2021) sampai elaborasi terhadap kontrak sosial yang diusung oleh Green (2025). Kedua konsepsi tersebut menitikberatkan bahwa dalam penggunaan kekuatan secara *hard power* maupun *soft power* perlu dinaungi oleh kewajiban moral dan legitimasi publik. Moralitas perlu dipahami bukan sekedar nilai abstrak saja, tetapi sebagai instrumen strategis untuk menentukan cara menggunakan kekuatan dan seperti apa kekuatan tersebut dipersepsikan. Terutama dalam situasi dan kondisi yang penuh manipulasi informasi dan arena perang opini. Fenomena tersebut menjadi titik awal mengenai perang moral yang sudah terjadi perlu dilihat sebagai bentuk nyata perang non kinetik pada ranah legitimasi, persepsi dan etika sosial.

Perang moral dalam praktiknya tidak selalu berbentuk propaganda yang merusak. Wujud perang ini dapat berupa pertahanan pada nilai universal, keadilan maupun integritas moral bangsa di tengah tekanan ideologi global. Propaganda di era modern kini berwujud partisipasi masyarakat untuk membangun pemaknaan dan moralitas konflik yang terjadi (Chernobrov, 2025). Situasi ini menjadikan *soft power* memiliki potensi untuk penguatan citra moralitas dan legitimasi terhadap kepentingan tertentu. Sehingga kepentingan merancang kerangka etik untuk menempatkan *soft power* sebagai fasilitas pertahanan terhadap nilai dan moral menjadi perlu diperhatikan.

Indonesia perlu menyikapi fenomena ini dengan serius. Sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya dan nilai luhur Pancasila memiliki relevansi kuat untuk mengembangkan model pertahanan kultural yang bersumber pada nilai etika dan moral bangsa. Salah satu bukti nyata yang dimiliki Indonesia untuk mengambil bagian dari pengembangan model pertahanan kultural adalah penerbitan buku

putih pertahanan Indonesia yang di dalamnya menekankan kekuatan non militer sebagai instrument menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional. Pendekatan yang diambil oleh Indonesia selaras dengan elaborasi Firchow (2020) dan Du Toit (2018) yang menjelaskan bahwa penyesuaian dan mempertahankan nilai sosial adalah bentuk tertinggi dari upaya menguatkan ketahanan nasional. Sehingga sinergi yang terjalin dapat menjadi strategi alternatif untuk menguatkan posisi Indonesia dalam dinamika global yang penuh persaingan nilai dan narasi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif integratif dengan metode tinjauan pustaka integratif. Pendekatan ini digunakan karena tujuan dari penelitian ini adalah mensintesis berbagai pandangan teoritik dan hasil penelitian dari objek studi etika militer, diplomasi budaya dan studi pertahanan non kinetik. Sehingga metode ini memfasilitasi peneliti untuk mengintegrasikan dimensi filosofis, normatif dan strategis menjadi kerangka konseptual yang utuh (Torraco, 2016; Whittemore dan Knafl, 2005)

Penelitian ini dilakukan dengan empat tahap yaitu identifikasi, seleksi, kategorisasi dan sintesis literatur. Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan identifikasi melalui penelusuran literatur yang terbit antara tahun 2015 hingga 2025 melalui basis data ilmiah yang tersedia pada Scopus, SpringerLink, Taylor dan Francis dan Oxford Academic. Peneliti juga menggunakan beberapa literatur klasik seperti karya dari Joseph Nye (2019; 2006) dan Antonio Gramsci (Hoare dan Nowell, 1999) sebagai penguatan landasan teoretikal. Kriteria yang peneliti gunakan untuk mencari sumber data mencakup relevansi terhadap tema *soft power*, etika perang, propaganda budaya dan perang moral. Kriteria lainnya adalah keterikatan dengan pembahasan perang modern dan publikasi ilmiah yang sudah melewati proses *peer review*.

Tahap kedua yang dilakukan adalah melakukan seleksi terhadap literatur

yang tersedia dengan kriteria nilai argumentatif dan kontribusi pada kerangka konseptual yang signifikan. Pada tahapan ini peneliti menggunakan prinsip *theoretical saturation* sebagai batasan untuk memilih literatur yang digunakan akan dihentikan ketika temuan konseptual mulai menunjukkan pengulangan dan tidak menambah pemaknaan baru bagi penelitian (Creswell dan Poth, 2018). Hasil seleksi awal menemukan lebih dari 30 sumber utama yang akan dikategorisasikan dalam tiga klaster utama yaitu perang moral dan legitimasi etika, *soft power* dan hegemoni budaya serta perang informasi dan propaganda moral.

Tahap ketiga yang dilakukan adalah melakukan pengkategorian untuk mendapatkan pola hubungan antar konsep dan kecenderungan tematik dalam literatur yang terseleksi. Pada proses ini peneliti melakukan Teknik constant comparative analysis yang berimplikasi pada setiap temuan dari satu sumber akan dibandingkan dengan temuan dari sumber lain untuk menghasilkan konsistensi makna dan argumentasi (Booth et al., 2016). Hasil yang didapatkan dalam tahap ini adalah peta konseptual yang memberikan gambaran hubungan keterkaitan antara teoritik etika moralitas strategi dan praktik pertahanan kultural.

Tahap terakhir adalah peneliti melakukan sintesis literatur sebagai proses menggabungkan berbagai pandangan untuk dijadikan satu model konseptual. Sintesis ini peneliti lakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara deskripsi dan interpretasi (Snyder, 2019). Perihal ini dilakukan agar hasil elaborasi dapat memberikan pemahaman tentang moralitas digunakan sebagai instrument pertahanan yang sah secara etis.

Etika dan Legitimasi Moral dalam Konteks Pertahanan

Legitimasi tindakan militer dan politik sebuah negara perlu dilandasi oleh etika dan moral. Sesuai dengan kerangka teoritik klasik *Just War Theory* memfokuskan nilai kebenaran moral sebagai kriteria untuk menggunakan kekuatan sebagai tindakan perang yang harus tunduk pada prinsip keadilan, proporsionalitas dan

tujuan yang sah (Baleng, 2025; Iverson, 2021). Seiring dengan perkembangan paradigma kontemporer, kerangka teoritik ini tidak hanya bergerak pada ranah militer konvensional melainkan menyebar ke ruang budaya dan informasi yang menjadikan legitimasi moral sebagai arena pertarungan narasi.

Green (2025) mengembangkan kerangka teoritik ini kependekatan kontrak sosial dengan fokus bahwa kondisi perdamaian akan terikat dengan situasi dan kemampuan negara mengelola kepercayaan moral pemerintah dan masyarakat. Jika kita tarik ke situasi peperangan modern maka implikasi bahwa kepercayaan terhadap moralitas adalah bentuk pertahanan yang nyata meski tidak berwujud kebendaan. Sehingga moralitas bukan sebagai penuntun secara etis saja, melainkan rangkaian instrument strategis yang dapat menentukan kekuatan nasional secara simultan.

Berbicara konteks pertahanan negara Indonesia, nilai moralitas terhubung secara filosofis pada Pancasila. Perihal ini memberikan ruang bagi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai dasar etika publik. Sehingga untuk menuju arena global dari konsepsi perang moral akan melampaui reputasi politik. Kredibilitas moral bangsa sebagai bagian dari sistem pertahanan kultural akan secara eksplisit terlibat di dalamnya.

***Soft Power* dan Hegemoni Budaya dalam Dinamika Moral Global**

Konsepsi *soft power* yang telah dirumuskan oleh Nye (2019; 2006) memberikan bangunan pemahaman bahwa kekuatan yang dilegitimasi tidak hanya bersumber dari paksaan saja. Kemampuan untuk memengaruhi secara nilai, budaya dan legitimasi moral memainkan peran penting dalam praktiknya. Khususnya dalam arena peperangan modern yang memiliki karakteristik hibrida, *soft power* menjadi sebuah dominasi untuk berkerja di domain kesadaran publik. Dalam domain kesadaran publik ini konstruksi opini, persepsi hingga preferensi dilakukan tanpa paksaan.

Sejalan dengan konsepsi *soft power* tersebut kerangka teoritik hegemoni budaya yang diusung oleh Gramsci (Hoare dan Nowell, 1999) memberikan elaborasi kritis terhadap fenomena ini. Gramsci telah memberikan analisis bahwa kekuasaan terhadap moralitas dan intelektualitas mampu menggantikan dominasi militer yang terstruktur (Hoare dan Nowell, 1999). Propaganda budaya dalam konteks global memosisikan diri sebagai alat bagi aktor negara maupun non negara untuk membangun konstruksi nilai, kesepakatan moral hingga membangun legitimasi kekuasaan baru (Chernobrov, 2025; Snow, 2002). Sehingga peran *soft power* dapat membangun kontrol ideologis yang berkerja pada domain budaya melalui penggunaan media. Studi Akbarov (2025) menguatkan pemahaman bahwa *soft power* sudah menjadi komponen utama di arena peperangan hibrida yang menggunakan moralitas sebagai normalisasi kekuasaan. Perihal ini mengimplikasikan bahwa perang moral memfasilitasi persuasive etis dan hegemoni simbolik dengan membentuk dominasi tanpa kekerasan namun mendalam.

Krisis Moral dan Perang Informasi Era Disrupsi Digital

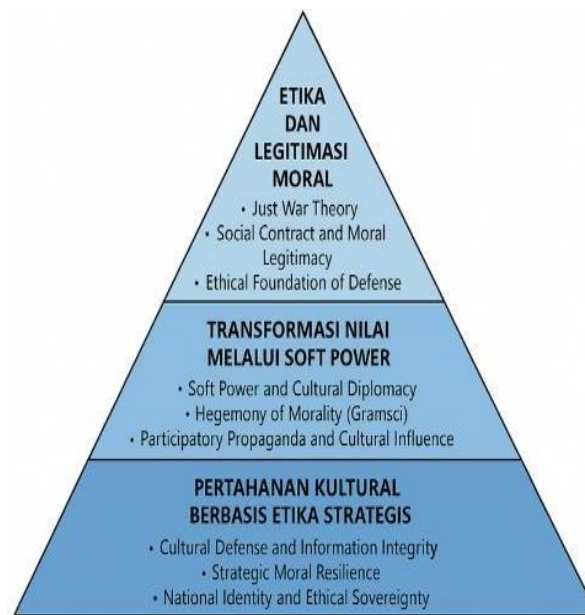
Memasuki era penuh dengan digitalisasi membangkitkan dimensi konflik yang menempatkan informasi sebagai arena peperangan dan moralitas publik adalah sasarannya. Wardle dan Derakhshan (2017) dalam studinya mengelaborasi fenomena ini sebagai bentuk kekacauan informasi ketika batas kebenaran dan manipulasi menjadi bias. Bila dikaitkan dengan penelitian ini maka propaganda bukan hanya saluran komunikasi politik, tetapi menciptakan ruang ketidaksesuaian moralitas hingga mengikis kepercayaan sosial dan etika publik.

Dilema etis dari pengaruh militer yang menggunakan manipulasi informasi untuk stabilitas strategis telah menjadi sorotan (Skerker, 2023). Situasi ini berimplikasi bahwa pertahanan dan propaganda sulit dipisahkan secara jelas. Nilai kebenaran digunakan pemegang kekuasaan dengan memanfaatkan rekayasa moralitas untuk tujuan politis. Chernyak dan Ivleva (2024) menambahkan analisis

pada kenyataan dalam dunia yang selalu bergerak, etika konflik perlu dipahami sebagai arena yang dinamis sehingga nilai universal akan selalu dibenturkan dengan kepentingan nasional dan global. Sehingga perang moral dalam konteks perang informasi perlu dilihat sebagai perlawanan etika akibat arus disinformasi dan nilai relatif dari sebuah moralitas. Keberhasilan memenangkan perang moral sangat bergantung pada pertahanan integritas moral sebagai bagian dari sumber daya strategis.

Model Pertahanan Kultural Berbasis Etika Strategis

Sintesis dari kerangka teoritis dan konseptual yang telah dielaborasi membentuk model konseptual perang moral yang menjadi inti penelitian ini. Model ini menggunakan tiga komponen yaitu dasar etika dan legitimasi sosial sebagai normative untuk memisahkan kekuatan sah dari kekuatan yang memaksa, transformasi nilai dari *soft power* sebagai pemanfaatan domain budaya dan legitimasi moral untuk konstruksi opini dan pertahanan terhadap krisis moral untuk menghadapi disinformasi melalui penguatan kesadaran etis dan strategis. Seluruh komponen ini menjadikan kekuatan moral menjadi komponen inti bangsa dalam menghadapi peperangan asimetris berbasis nilai dan informasi.



Gambar 1. Model Konseptual Perang Moral

Sumber: Diolah peneliti.

Dasar Etika dan Konsep Perang Moral

Gagasan perang moral bermula pada kekuatan moral dan legitimasi etis dapat digunakan sebagai instrument strategis untuk mempertahankan nilai dan kepentingan suatu bangsa. Melalui kerangka teoritis klasik *Just War* yang dikembangkan oleh Augustine dan Aquinas yang di kontekstualkan kembali oleh Baleng (2025) dan Iverson (2021) gagasan perang moral ini dielaborasi. Konsepsi bahwa perang dapat dibenarkan bila terpenuhi dua prinsip yaitu tujuan yang adil (*jus ad bellum*) dan menggunakan cara yang bermoral (*just in bello*). Kedua prinsip ini tetap relevan dalam situasi simbolik yang berada pada arena perang ide, informasi dan persepsi secara intensif.

Konsepsi kontrak sosial meluaskan konsepsi ini sebagai dasar moral untuk stabilitas dan mencegah konflik (Green, 2025). Konsepsi ini mengelaborasi legitimasi kekuasaan dibangun dari kepercayaan publik terhadap etika penguasa untuk menggunakan kekuasaan. Perihal ini berimplikasi praktis bahwa moralitas bukan suatu bentuk nilai abstrak tetapi menjadi sumber kekuatan strategis untuk

menguatkan daya tahan sosial maupun politis. Perang moral dalam hal ini dapat dipahami sebagai usaha mempertahankan tatanan moral terhadap ancaman ideologis, manipulasi dan destruktif akibat perang informasi maupun propaganda. Pendekatan moral dalam arena peperangan dikuatkan oleh pemikiran Gramsci melalui teori hegemoni budaya yang berfokus pada dominasi ideologis dapat dibangun melalui kontrol terhadap nilai dan kesadaran kolektif (Hoare dan Nowell, 1999). Sehingga perang moral bukan hanya sikap reaktif terhadap ancaman, tetapi sebagai bentuk strategi berbasis nilai untuk menegaskan kesadaran moral dan ideologis. Sehingga dalam konteks global saat ini garis tepi antara informasi, budaya dan kekuasaan semakin bias menjadikan dasar mengembangkan pertahanan non kinetik berdasarkan etika.

Soft Power dan Transformasi Nilai Moral

Seiring dengan perkembangan *soft power* tidak hanya berjalan pada koridor moral yang netral. Penerapan *soft power* dengan domain budaya kerap kali digunakan secara selektif untuk menguatkan posisi politis dan menjadi instrument legitimasi ideologis dalam konflik. Pada kondisi ini moralitas berperan sebagai filter etis yang menentukan penggunaan *soft power* dapat menguatkan atau merusak nilai kemanusiaan.

Studi yang dilakukan Melissen (2005) dan (Skerker, 2023) mewaspadaikan bahwa strategi yang menggunakan pengaruh budaya dan operasi militer akan membawa implikasi secara dilematis pada domain moralitas. Narasi yang dibangun untuk membentuk persepsi publik akan membiaskan batas persuasif dan manipulasi pada praktiknya. Sehingga, *soft power* perlu digunakan secara selektif dan mempertimbangkan nilai etis yang bersumber dari moralitas. Konsistensi terhadap prinsip keadilan yang bertanggung jawab menjadi porsi besar untuk dipertimbangkan. Dalam konteks perang moral perlu mewadahi rekonstruksi *soft power* sebagai mekanisme membangun legitimasi moralitas secara global.

Indonesia dengan nilai moral yang tercermin dalam Pancasila dapat dijadikan fondasi *soft power* nasional. Nilai moral keadilan sosial dan gotong royong dapat dijadikan salah satu nilai utama untuk membangun *soft power* bagi bangsa Indonesia. Melalui studi yang dilakukan oleh Tulus dan Yuania (2023) memberikan penegasan bahwa diplomasi Indonesia cenderung menggunakan pendekatan moral melalui diskusi yang netral dan berpihak pada nilai keadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi penerapan moralitas dalam *soft power* sebagai bentuk pertahanan kultural akan berdampak pada citra etis Indonesia di ketegangan arena geopolitik dunia. Sehingga makna moralitas bukan hanya sumber legitimasi, tetapi sudah dibangun sebagai identitas strategis dalam hubungan internasional.

Perang informasi dan Krisis Legitimasi Moral

Perubahan arena konflik menjadikan perang informasi dan perang hibrida sebagai bentuk umum dari peperangan modern. Akbarov (2025) dalam studinya melakukan analisis bahwa instrument *soft power* sudah menyatu dengan strategi hibrida yang menggabungkan diplomasi, teknologi dan manipulasi informasi. Dalam situasi tersebut moralitas dibenturkan dengan keadaan kebenaran yang menjadi relatif dan narasi dapat direkayasa sehingga, hanya kekuatan moralitas yang menuntun legitimasi. Studi lain yang dilakukan oleh Chernobrov (2025) telah menunjukkan bahwa propaganda pada saat ini lebih bersifat partisipatif sehingga masyarakat telah menjadi pembentuk moralitas politik melalui ruang media yang tersedia.

Fenomena ini juga turut berperan dalam membangun krisis legitimasi moral seperti narasi yang menguasai masyarakat ditentukan dari nilai kebenaran pihak yang mampu menguasai konstruksi narasi tersebut. Perihal ini sesuai dengan yang studi yang dilakukan Wardle dan Derakhshan (2017) bahwa situasi tersebut adalah kekacauan informasi, dimana fakta, opini bahkan propaganda sudah tercampur dan memicu kebingungan moral publik yang berimplikasi pembuat informasi telah

menguasai secara menyeluruh konstruksi informasi yang ada. Situasi tersebut mendorong perang moral sebagai kebutuhan strategis untuk melindungi nilai etis dan moral yang harus dipertahankan. Negara harus mampu menjaga nilai moral secara konsisten untuk memenangkan kepercayaan publik.

Salah satu implikasi langsung di Indonesia tentang urgensi membangun pertahanan kultural berbasis etika strategis telah tercantum dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015. Dalam pemaparannya menekankan pada kekuatan non militer memiliki peran penting dan vital untuk menjaga ketahanan nasional (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Melalui pendekatan perang moral, pertahanan kultural mampu dipahami sebagai upaya bersama untuk menegakkan nilai kebenaran, keadilan dan tanggung jawab dalam ruang informasi yang penuh gangguan. Strategi ini tidak menempatkan dominasi sebagai instrumen vital, tetapi memulihkan kepercayaan publik dan legitimasi moral yang lebih kompleks.

Kesimpulan

Elaborasi ini memberikan pemahaman bahwa kekuatan moral adalah kolaborasi dimensi etika, budaya dan komunikasi strategis yang luput dari kajian pertahanan modern. Pergeseran karakter konflik menjadikan moralitas bukan panduan etis untuk berperilaku, tetapi menjadi instrumen pertahanan untuk mempertahankan legitimasi dan ketahanan nasional sebagai bangsa. Sintesis literatur telah menunjukkan bahwa perang moral dipandang sebagai arena menjembatani antara nilai etika, strategi pengaruh budaya dan pertahanan kultural untuk menghadapi ancaman asimetris.

Tiga elemen yang dihasilkan dari elaborasi ini sudah memperlihatkan keterkaitan erat antara fondasi etika perang, transformasi nilai melalui *soft power* dan dinamika perang informasi. Pertama melalui kerangka teoritis *Just War* dan kontrak sosial sebagai dasar normatif bahwa tindakan yang berkaitan dengan kekuasaan

memerlukan legitimasi moral yang diakui oleh publik dalam praktiknya. Kedua konsep teoritik *soft power* pada mulanya hanya sebagai alat diplomatik kultural kini sudah bergerak menjadi arena pertarungan nilai dengan menggunakan domain budaya menjadi sumber pengaruh moralitas. Terakhir adalah perang moral menjadi filter etis untuk memisahkan propaganda destruktif dengan komunikasi strategis ditengah kekacauan informasi yang terjadi. Keseluruhan elemen ini membentuk kerangka pertahanan kultural berlandaskan etika strategis dengan menempatkan moralitas sebagai sumber kekuatan nasional.

Implikasi strategis bagi Indonesia untuk menerapkan perang moral sebagai langkah nyata memperkuat ketahanan non militer dan melebarkan daya jangkau diplomasi nasional. Nilai-nilai yang dikandung Pancasila berperan sebagai dasar moral menguatkan *soft power* Indonesia di dunia internasional. Dalam konteks peperangan asimetris, strategi ini memberikan ruang bagi Indonesia untuk mempertahankan kekuasaan narasi tanpa perlu terlibat dalam konfrontasi militer. Perang moral berperan lebih jauh lagi untuk dijadikan instrumen komunikasi strategis dengan mencitrakan nilai etis dan moralitas Indonesia ditengah polarisasi geopolitik.

Pada akhirnya perang moral bukan hanya tentang idealitas, namun inti dari perang kultural yang simultan. Di era perang informasi, disinformasi dan kontestasi nilai bangsa yang mengikat erat moralitas dan etik akan unggul secara strategis. Sehingga mempertahankan moralitas perlu dianggap sama dengan mempertahankan kedaulatan negara. Makna akan kedaulatan nilai sebagai identitas bangsa perlu di prioritaskan untuk bisa bertahan dalam arena peperangan asimetris.

Daftar Pustaka

- Akbarov, M. (2025). The Impact of “Soft Power” Means on the Hybridization of Modern Wars. *Metafizika Journal*, 8(1),54–73. <https://doi.org/10.33864/2617-751x.2025.v8.i1.54-73>
- Baleng, G. T. (2025). Just war theory and scapegoat mechanism: An analysis of missio Dei and social order. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 81(1), 1–8. <https://doi.org/10.4102/hts.v81i1.10262>
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). *Systematic Approaches to a Successful Literature Review*. SAGE Publications.
- Chernobrov, D. (2025). Participatory propaganda and the intentional (re)production of disinformation around international conflict. *Critical Studies in Media Communication*,42(1), 101–106. <https://doi.org/10.1080/15295036.2025.2467433>
- Chernyak, A. Z., & Ivleva, M. L. (2024). The Ethics of Conflict in Changing World. *RUDN Journal of Philosophy*, 28(3), 872–884. <https://doi.org/10.22363/2313-2302-2024-28-3-872-884>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publication.
- Du Toit, F. (2018). When political transitions work: Reconciliation as interdependence. In *When Political Transitions Work: Reconciliation as Interdependence*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/ia/iiaa065>
- Firchow, P. (2020). When political transitions work: reconciliation as interdependence. *International Affairs*, 96(3), 807–809. <https://doi.org/10.1093/ia/iiaa065>
- Green, S. D. (2025a). On the social contract as key to preventing wars: A revised perspective of conflict management. In *International Relations Theory and Philosophical Political Insights Into Conflict Management* (pp. 231–259). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-9626-1.ch010>
- Green, S. D. (2025b). *On the Social Contract as Key to Preventing Wars* (pp. 231– 260).

<https://doi.org/10.4018/979-8-3693-9626-1.ch010>

- Hoare, Q., & Nowell, G. (Eds.). (1999). *Prison Notebooks of Antonio Gramsci* (Q. Hoare & G. Nowell, trans.). Lawrence & Wishart.
- Iverson, J. (2021). Jus Post Bellum. In *Leiden Studies on the Frontiers of International Law* (Vol. 8). Brill Nijhoff. <https://doi.org/10.51644/9780889206595-010>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Melissen, J. (2005). The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice. *Studies in Diplomacy and International Relations*, 3–27. https://doi.org/10.1057/9780230554931_1
- Nye, J. S. (2019). Soft Power and Public Diplomacy Revisited. *The Hague Journal of Diplomacy*.
- _____. (2006). *Soft power : the means to success in world politics*. PublicAffairs.
- Skerker, M. (2023). The Ethics of Military Influence Operations. *Conatus*, 8(2), 589–612. <https://doi.org/10.12681/cjp.35113>
- Snow, N. (2002). *Propaganda, Inc: Selling America's Culture to the World*. Seven Stories Press.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(March), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Torraco, R. J. (2016). Writing Integrative Literature Reviews. *Human Resource Development Review*, 15(4), 404–428. <https://doi.org/10.1177/1534484316671606>
- Tulus, D., & Yuania, S. (2023). Diplomasi Indonesia dalam Konflik Rusia -Ukraina: Sebuah Kajian Tentang Soft-Power. *Journal of Political Issues*, 4(2), 74–88.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. *Report to the Council of Europe*, September 2017, 108.



Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: updated methodology. *Journal of Advanced Nursing*, 52(5), 546–553. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x>